

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam mengambil kebijakan makroekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan bagian yang integral dari kebijakan makroekonomi yang mempunyai target jangka panjang dan jangka pendek. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal yang positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena penting yang dialami dunia pada dua abad terakhir, yang oleh seorang ahli ekonomi terkemuka Amerika Serikat, Kuznetz (peraih Nobel), disebut sebagai *Modern Economic Growth*. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Didalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan berarti perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya. Tetapi akan sangat sukar untuk memberi gambaran tentang berbagai perkembangan tersebut untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu dalam analisis makroekonomi tingkat pertumbuhan yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas harga pokok telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada periode 2005-2006. Data Susenas Maret 2008, menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai titik terendah. Penurunan ini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Sejak krisis ekonomi 1998 sampai dengan 2005, jumlah penganggur mengalami kenaikan secara nominal dan persentase terhadap angkatan kerja. Namun sejak tahun 2006, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan *net employment* yang positif, sehingga menghasilkan tingkat pengangguran yang menurun baik secara absolut maupun secara persentase terhadap angkatan kerja. Ekspansi lapangan kerja ini didukung oleh penciptaan lapangan kerja di sektor formal.

Namun demikian pencapaian tersebut masih berada dibawah harapan masyarakat dan sasaran pemerintah sendiri yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2004-2009. Tingginya harapan masyarakat tersebut bisa dimengerti karena pencapaian kinerja ekonomi selama 30 tahun hampir lenyap disebabkan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Krisis ekonomi pada 10 tahun silam telah meninggalkan trauma yang cukup dalam, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Walaupun demikian, berbagai kebijakan ekonomi yang tidak populer, seperti kebijakan penyesuaian harga BBM tahun 2005 dan awal tahun 2008 berhasil digulirkan. Kebijakan ini ternyata berhasil menstabilkan dan menggerakkan kembali perekonomian Indonesia.

Tabel 1.1. Nilai PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2008 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008

	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan		Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
		(Triliun Rupiah)		(Triliun Rupiah)		2008 (HK)	2008
		2007	2008	2007	2008	(Persen)	(Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	541,6	713,3	271,4	284,3	4,8	0,7
2	Pertambangan dan Penggalian	441,0	543,4	171,4	172,3	0,5	0,0
3	Industri Pengolahan	1 068,7	1380,7	538,1	557,8	3,7	1,0
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	34,7	40,8	13,5	15,0	10,9	0,1
5	Konstruksi	305,2	419,3	121,9	130,8	7,3	0,5
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	589,3	692,1	338,8	363,3	7,2	1,2
7	Pengangkutan dan Komunikasi	264,3	312,5	142,3	166,1	16,7	1,2
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	305,2	368,1	183,7	198,8	8,2	0,8
9	Jasa-jasa	399,3	483,8	182,0	193,7	6,4	0,6
	Produk Domestik Bruto (PDB)	3 949,3	4 954,0	1 963,1	2 082,1	6,1	6,1
	PDB Tanpa Migas	3 532,8	4 426,4	1 820,5	1 939,3	6,5	-

Sumber : BPS 2008

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2008, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, dimana tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,7%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sejak krisis moneter tahun 1997/98 mengalami percepatan terutama dalam periode 2004-2008. Akselerasi ini didukung pula dengan makin seimbangya sumber pertumbuhan ekonomi dimana investasi makin penting perannya, sementara konsumsi masyarakat tetap terjaga tinggi tingkat pertumbuhannya. Dengan keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi makro (nilai tukar dan inflasi), pendapatan per kapita Indonesia jika diukur dalam mata uang

USD, meningkat 1,8 kali pada akhir 2008 dibandingkan akhir 2004 dan melebihi USD 2.000 per kapita pada akhir 2008.

Pada banyak negara dunia berkembang, yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah, mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi memang sangat mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Oleh karena masih relatif lemahnya kemampuan partisipasi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi, mengharuskan pemerintah untuk mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun adalah melalui perkembangan sektor keuangan yang semakin pesat dewasa ini. Tetapi seiring perkembangan moneter tersebut sekarang menyebabkan hubungan antara jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi maupun laju inflasi cenderung kurang stabil. Akibatnya krisis moneter melanda negara-negara berkembang dan memporakporandakan struktur perekonomiannya. Bahkan bagi Indonesia hal ini berlanjut pada krisis ekonomi dan politik yang telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap sendi-sendi perekonomian nasional (Prayitno dan Sanjaya, 2002: 43).

Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang mengingat beberapa hal. *Pertama*, perubahan dalam teknologi telah menurunkan elastisitas penciptaan lapangan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi. Artinya jika kita ingin menurunkan tingkat pengangguran menuju sekitar 4-5%, maka dalam dekade mendatang sektor non migas Indonesia harus selalu mampu tumbuh di atas 7%. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia

dan memaksa banyak negara melakukan reorientasi strategi pembangunan ekonominya. *Kedua*, Tingkat kemiskinan Indonesia juga masih tergolong tinggi. Sebagian besar keluarga Indonesia masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Laju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa dekade mendatang akan kita butuhkan bukan hanya untuk mengentaskan kemiskinan absolut (dewasa ini sekitar 6%) namun juga untuk mengurangi penduduk yang tergolong nyaris miskin (*near poor*) yang jumlahnya hampir separuh rakyat Indonesia. Kelompok rumah tangga yang nyaris miskin ini tergolong rentan terhadap gejolak baik yang sifatnya individual maupun global atau sistemik. Penguatan kelompok ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian domestik dan proses transisi demokrasi mengingat kelompok ini merupakan bagian penting dari kelas menengah. Kita juga perlu mengembalikan kinerja sektor penghasil barang (*tradables*) yang tertinggal dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir. Pertumbuhan sektor *tradables* yang cepat, sangat dibutuhkan untuk membiayai investasi dan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri di masa mendatang.

Dalam mengontrol pergerakan sistem perekonomian nasional dikenal kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat yang dapat menimbulkan fluktuasi jangka pendek pada output dan harga. Para pembuat kebijakan akan melakukan antisipasi dalam mengatasi dampak tersebut dan mungkin saja menyesuaikan kebijakan lain sebagai tanggapannya. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan dan penerimaan (pajak) pemerintah secara keseluruhan. Dalam jangka panjang kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka

pendek dampak utama dari kebijakan fiskal adalah terhadap permintaan agregat barang dan jasa (Mankiw, 2006: 338).

Dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara, peranan pemerintah secara empiris tidak dapat dielakkan. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki dua instrument pokok, yaitu; perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran (*expenditure*). Dengan menggunakan dua komponen tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan inflasi. Dalam hal pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi (misalnya; pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilitas ekonomi) tetapi juga peningkatan harkat sosial seperti, pemerataan, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu secara ringkas Mankiw (2000) mendefinisikan fiskal adalah “ *The government's choice regarding levels of spending and taxation*”.

Dalam perekonomian yang didasarkan pada mekanisme pasar, dimana Indonesia semakin menguatkan landasan itu dalam pengaturan perekonomiannya, dimensi persoalan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tidak lagi terbatas pada relasi antar kebijakan makro ekonomi (Fiskal, Moneter, Perdagangan dan Investasi) tetapi akan juga menyangkut keterkaitan antara makro dan mikro ekonomi. Sehingga arah perubahan dan kebijakan fiskal tidak lagi cukup sampai pada posisi intervensi pemerintah yang minimum (*minimalist government intervention*) akan tetapi haruslah sampai pada formula kebijakan fiskal yang mampu mewujudkan sinergi antara sektor pemerintah dengan sektor swasta (*complementarity of government and market*) (Meier, 2001 dalam

Subiyanto dan Singgih, 2004). Apapun pengambilan keputusan dalam fiskal harus dapat mendorong kondisi *get price right, get all policies right, dan get institution right* dalam perekonomian Indonesia (Buiters, 2002 :459).

Keselaran kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia pada tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi kebijakan fiskal, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, pemerintah mampu memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari defisit anggaran yang mampu dikendalikan pada level 1,0% dari PDB pada tahun 2006 meskipun lebih tinggi dari sasaran awal 0,7% dari PDB. Terkendalnya defisit anggaran ini mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5% pada tahun 2006. Sedangkan dari sisi moneter, stabilitas harga tetap terjaga dengan pengendalian inflasi pada level 6,60% (y-oy) dibandingkan awal tahun 2006 yang mencapai 17,03%(y-oy) (Bank Indonesia, 2006). Hal ini juga ditandai dengan menurunnya tingkat suku bunga SBI sehingga kondisi tersebut memberikan sinyal yang positif bagi sektor riil.

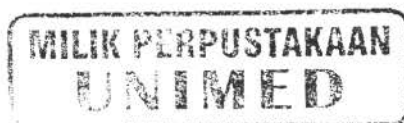
Sedangkan kebijakan moneter dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang berhubungan dengan jumlah uang beredar. Dimana bank sentral sebagai otoritas dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter berupaya untuk mempengaruhi atau mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, permintaan uang merupakan salah satu fungsi kunci dalam semua model makro ekonomi, dimana fluktuasi permintaan uang menunjukkan efektivitas dari kebijaksanaan moneter untuk mengatur pengaruh stabilitas sektor riil dalam kondisi ekonomi secara makro.

Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan

nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu (Mishkin, 2004). Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi antara lain: pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter.

Idealnya, semua sasaran akhir kebijakan moneter dapat dicapai secara simultan dan berkelanjutan. Namun, pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa hal yang dimaksud sulit dicapai, bahkan ada kecenderungan bersifat kontradiktif. Misalnya kebijakan moneter yang kontraktif untuk menekan laju inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa perekonomian memburuk karena kebijakan moneternya bertujuan ganda. Untuk alasan ini, mayoritas Bank Sentral termasuk BI fokus pada sasaran tunggal yaitu mencapai dan memelihara inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam perekonomian Indonesia, permasalahan jumlah uang beredar (JUB) dan tingkat inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang sangat penting. Kedua indikator ini, masing-masing mempunyai faktor-faktor penyebab dan mempunyai dampak negatif yang parah terhadap perekonomian bila tidak segera diatasi. Variabel uang beredar penawaran ataupun penawaran uang tidak saja sebagai variabel ekonomi pada umumnya, tetapi juga berperan menjadi variabel kontrol atau variabel kebijakan ataupun variabel yang ditargetkan guna mencapai tujuan tertentu dari kebijakan pemerintah. Hal ini karena uang beredar sering sekali dikaitkan dengan masalah perubahan harga ataupun laju inflasi (Insukindro, 1993 :76).



Dalam hipotesa Keynes, penawaran uang atau *Money Supply* memiliki pengaruh positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, bank sentral akan mengambil kebijakan (menurunkan) tingkat suku bunga. Kondisi ini mendorong para investor untuk melakukan investasi, yang pada akhirnya akan menciptakan kenaikan output dan memicu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, permintaan uang memiliki hubungan negatif dengan output, meningkatkan permintaan uang akan berakibat pada peningkatan tingkat suku bunga dan pada akhirnya berakibat pada penurunan output. Investasi suatu negara akan menghasilkan output bagi negara tersebut, yang pada akhirnya akan menjadi pendapatan nasionalnya. Pengambilan keputusan dalam hal saving dan investasi berhubungan erat dengan tingkat suku bunga atau *interest rate* yang berlaku. Bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter harus mampu menjaga kestabilan *interest rate* yang menarik bagi masyarakat untuk menabung dan juga untuk meningkatkan gairah investor untuk berinvestasi, selain itu tetap menjaga supply uang beredar di masyarakat untuk mencegah terjadinya inflasi, sebagai akibat dari berlebihnya jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang-barang dan menimbulkan inflasi.

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. *Resultante* (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun). Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*.

Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus. Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Tabel 1.2. Inflasi Nasional tahun 2006 -2009 (2002 = 100)

BULAN	IHK				INFLASI			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Januari	138,72	147,41	158,26	113,78*)	1,36	1,04	1,77	0,07*)
Februari	139,53	148,32	159,29	114,02*)	0,58	0,62	0,65	0,21*)
Maret	139,57	148,67	160,81	114,27*)	0,03	0,24	0,95	0,22*)
April	139,64	148,43	161,73	113,92*)	0,05	0,16	0,57	0,31*)
Mei	140,16	148,58	164,01	113,97*)	0,37	0,10	1,41	0,04*)
Juni	140,79	148,92	110,08	114,10*)	0,45	0,23	2,46	0,11*)
Juli	141,42	149,99	111,59	114,61*)	0,45	0,72	1,37	0,45*)
Agustus	141,88	151,11	112,16*)		0,33	0,75	0,51*)	
September	142,42	152,32	113,25*)		0,38	0,80	0,97*)	
Oktober	143,65	153,53	113,78*)		0,86	0,79	0,45*)	
November	144,14	153,81	113,90*)		0,34	0,18	0,12*)	
Desember	145,89	155,50	113,86*)		1,21	1,10	0,04*)	

*) Tahun dasar 2007 (2007 = 100)

Sumber : BPS

Menurut Data Strategis BPS 2009 dalam Tabel 1.2, berdasarkan hasil pemantauan BPS di 66 kota (sampai dengan Mei 2008, pemantauan data harga dilakukan di 45 kota), pada bulan Juli 2009 terjadi inflasi 0,45 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 114,10 pada bulan Juni 2009 menjadi 114,61 pada bulan Juli 2009. Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh inflasi Juli 2009 sebesar $((114,61 - 114,10) / 114,10) \times 100\% = 0,45\%$.

Laju inflasi tahun kalender 2009 sebesar 0,66 persen (IHK Juli 2009 dibandingkan IHK Desember 2008), sedangkan laju inflasi *year on year* (IHK Juli 2009 terhadap IHK Juli 2008) adalah 2,71 persen. Secara periodik, IHK dan inflasi dari bulan Januari 2006 sampai dengan Juli 2009.

Jumlah uang beredar dalam suatu kurun waktu tertentu sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berapa besar jumlah uang yang dikonsumsi penduduk suatu negara dan berapa besar jumlah uang yang dijadikan tabungan penduduk suatu negara adalah merupakan suatu alternatif keputusan atau motif memegang uang, yang meliputi motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi, yang dikenal dengan teori *liquidity preference* yang dicetuskan oleh J.M. Keynes (Fabozzi, dkk, 1991).

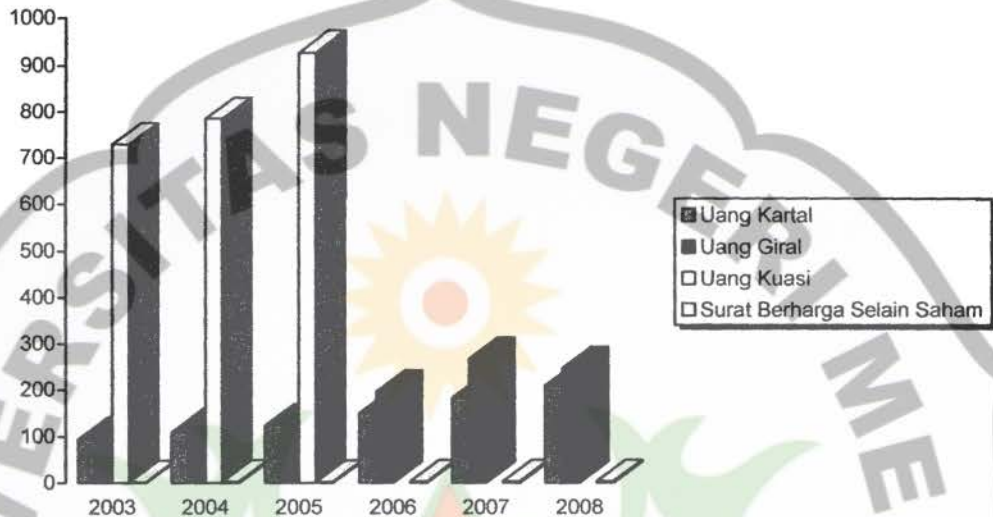
Tabel 1.3 Jumlah Uang Beredar dalam miliar rupiah kurun waktu 2003 – 2008

Akhir Periode	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah (M1)	Uang Kuasi	Surat Berharga Selain Saham	Jumlah (M2)
2003	94,333	119,451	213,784	728,788	1,794	944,366
2004	109,028	136,918	245,946	785,261	2,670	1,033,877
2005	123,991	147,148	271,139	929,343	2,280	1,202,762
2006	150,654	196,359	347,013	1,032,865	2,615	1,382,493
2007	182,967	267,089	450,056	1,196,119	3,487	1,649,662
2008	209,747	247,040	456,787	1,435,772	3,280	1,895,839

Sumber : Bank Indonesia

Dari Tabel 1.3, dapat dilihat jumlah uang beredar pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan penduduk. Namun pada kolom uang giral terdapat penurunan dari tahun 2007 sebesar 267.089 M menjadi 247.040 M di tahun 2008. Juga kolom surat berharga selain saham terdapat fluktuasi, penurunan terjadi di tahun 2005 yakni sebesar 2.280 M yang turun dari tahun 2004 sebesar 2.670 M. Begitu pula tahun 2008 yang turun dibandingkan 2007 yakni dari 3.487 M menjadi 3.289 M. Hal ini tentunya berkaitan dengan kondisi ekonomi secara

makro pada masa itu serta kebijakan pemerintah dan otoritas moneter pada saat itu. Jumlah uang beredar dapat menggeser kondisi perekonomian dari baik ke buruk atau sebaliknya. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Grafik Jumlah Uang Beredar tahun 2003 - 2006

Salah satu faktor penting dalam menganalisa dan meramalkan tingkat suku bunga adalah inflasi. Pengertian inflasi dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang serta jasa-jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat adanya gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang (Winardi, 1995:58).

Secara teoretis terdapat dua jalur utama mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu melalui jalur jumlah uang yang beredar dan jalur harga melalui suku bunga. Jalur suku bunga ini merupakan jalur bagian yang penting untuk perekonomian Indonesia.

(Warjiyo,dkk, 2003: 126). Pengujian empiris mengungkapkan bahwa pengaruh suku bunga terhadap inflasi mempunyai hubungan yang lebih stabil dibandingkan dengan agregat moneter. Upaya untuk menekan fluktuasi tingkat suku bunga tergantung pada keberhasilan mengendalikan gejolak di pasar uang.

Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan ataupun menabung uangnya tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang sangat luas, tidak hanya pada sektor moneter, melainkan juga pada sektor riil, sektor ketenagakerjaan, bahkan sektor internasional (Erawati, 2002: 83).

Apabila tingkat bunga naik, maka investor saham akan menjual seluruh atau sebagian sahamnya untuk dialihkan ke dalam investasi lainnya yang relatif lebih menguntungkan dan bebas resiko, akibatnya indeks akan turun. Sebaliknya bila tingkat bunga turun, maka masyarakat akan mengalihkan investasinya pada saham yang relatif lebih *profitable* dan akibatnya indeks akan naik. Dengan demikian tingkat bunga akan memberikan pengaruh negatif terhadap indeks saham. Seperti kita ketahui bahwa tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham, karena investor cenderung menarik investasinya dan memindahkannya dalam bentuk tabungan / deposito.

Secara garis besar fluktuasi yang terjadi dipasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Apabila jumlah uang beredar dimasyarakat meningkat akan menyebabkan para pelaku usaha maupun perusahaan-perusahaan lebih mudah mendapatkan dana melalui perbankan dari pada melalui pasar modal. Hal ini disebabkan supply dana yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya alokasi kredit atau pinjaman dari sektor perbankan kepada dunia usaha

sehingga para pelaku lebih mudah mencari dana melalui sektor perbankan. Oleh karena itu dengan semakin menurunnya minat para pelaku usaha maupun perusahaan-perusahaan dalam mencari dana di pasar modal akan menyebabkan pasar modal menjadi tidak menarik lagi bagi para investor. Dengan demikian jumlah uang yang beredar akan memberikan pengaruh negatif terhadap investasi saham. Perubahan kurs valas (yang diwakili oleh US\$) juga akan memberikan dampak bagi pasar modal. Apabila kurs valas menguat, maka investor akan menjual seluruh atau sebagian sahamnya dan dialihkan pada valas untuk kemudian diinvestasikan ke tempat lain sebagai tabungan, sehingga harga saham akan turun. Sebaliknya jika kurs valas melemah, investor akan membeli mata uang domestik untuk diinvestasikan pada saham, sehingga harga saham akan cenderung naik. Variabel kurs valas atau *exchange rate* mempunyai pengaruh langsung berupa kenaikan harga barang ekspor maupun barang impor didalam negeri (Budiono, 1997:189).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

1.1. Perumusan Masalah

Melihat pentingnya peranan kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian suatu negara, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan dan tingkat signifikansi antara suku bunga deposito, nilai tukar, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Bagaimana hubungan dan tingkat signifikansi antara jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat suku bunga deposito di Indonesia.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan dan tingkat signifikansi antara suku bunga deposito, nilai tukar, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Untuk mengetahui hubungan dan tingkat signifikansi antara jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat suku bunga deposito di Indonesia.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mengetahui hubungan jumlah uang beredar riil, tingkat inflasi, nilai tukar, penerimaan pajak, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat bunga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pembuat keputusan atau perencana kebijakan pembangunan.
2. Sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak yang memiliki minat atau yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini guna memperkaya sumber kajian ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.

